

# ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA

# LAPORAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN

# TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

# BADAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH

# KOTA TEGAL TAHUN 2021-2023

**SKRIPSI**

# Oleh: Ukhti Barizun

**NPM : 4120600272**

Diajukan Kepada:

# Program Studi Manajemen

# Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

# Universitas Pancasakti Tegal

# 2024



**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA**

**LAPORAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

**BADAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAHAN**

**KOTA TEGAL TAHUN 2021-2023**

# SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Ukhti Barizun**

**NPM : 4120600272**

Diajukan Kepada:

**Program Studi Manejemen**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**



**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA**

**LAPORAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKA**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

**BADAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH**

**KOTA TEGAL TAHUN 2021-2023**

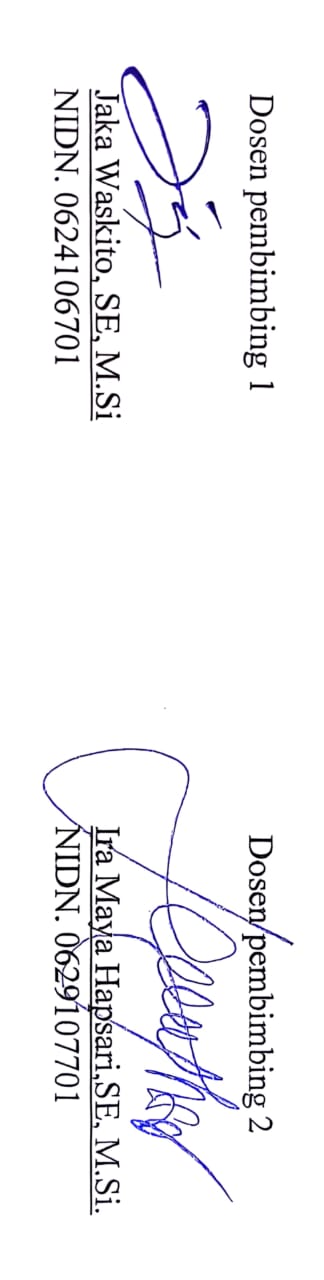
# SKRIPSI

Oleh :

# Ukhti Barizun

# NPM : 4120600272

**Disetujui Untuk Ujian Skripsi Tanggal : 16 Juli 2024**

****



**Pengesahan Skripsi**

Nama : Ukhti Barizun

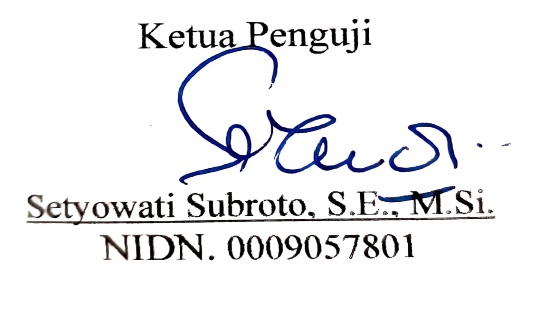
NPM : 4120600272

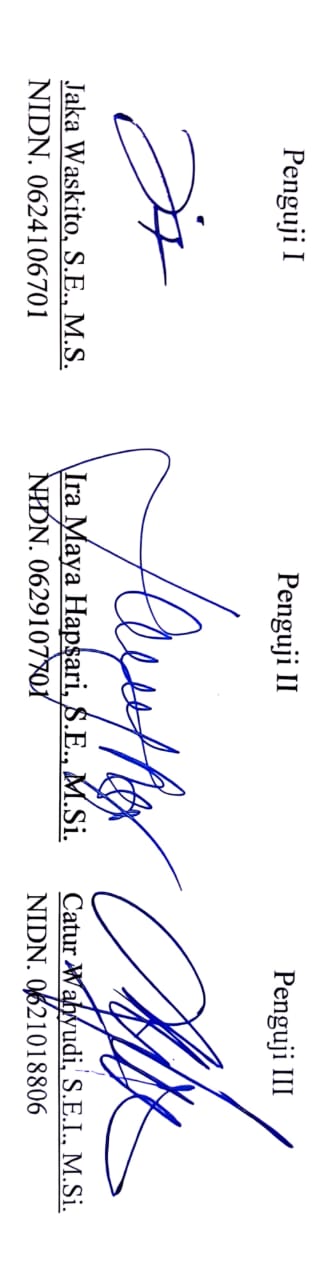
Judul : Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Laporan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Kota Tegal Tahun 2021-2023

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Juli 2024







**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO**

“Sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan”

(QS. An-Nahl: 128)

**PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan untuk :

1. Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi kekuatan, rahmat dan karunia serta kemudahan dalam penyelesaian skripsi.
2. Kedua Orang tua saya Ibu Zubaedah dan Bapak Ridwan yang senantiasa mendoakan, memberi kasih sayang, dan dukungan yang begitu besar.
3. Segenap teman-temanku yang sedang berjuang bersama, yang selalu memberi dorongan dan menjadi pendengar yang baik.
4. Untuk diriku sendiri yang senantiasa berusaha dan berani mencoba dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Untuk kekasih saya M.Andrian Maulana yang selalu memberi dorongan serta mendukung saya dan menemani saya dalam mengerjakan skripsi saya.
6. Untuk Almamater Universitas Pancasakti Tegal.

**PERTANYAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ukhti Barizun

NPM : 4120600272

Program Studi : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“Analisis** **Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Laporan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023”**

1. Merupakan hasil karya sendiri dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi, atau pemalsuan data maupun bentuk kecurangan yang lain saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab



**ABSTRAK**

**Ukhti Barizun. 2024. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Laporan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal. Mewujudkan pemerintah yang biak, harus didukung oleh kinerja keuangan yang baik, serta meningkatnya tuntunan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dengan jumlah 80 responden. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden dan dianalisis menggunakan analisis statistik dengan bantuan software SPPS.

Hasil penelitian ini menunjukkan uji secara parsial pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,111 dan nilai signifikansi 0,00 < 0,05 yang berarti berpengaruh signifikan terhadap transparansi. Kinerja Laporan Keuangan Daerah secara parsial memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,260 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti berpengaruh signifikan terhadap transparansi. Pengelolaan keuangan daerah secara parsial memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,123 dan nilai signifikansi 0,01 < 0,05 yang berarti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Kinerja Laporan Keuangan Daerah secara parsial memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,521 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Secara simultan Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah menunjukkan nilai Uji ANOVA atau Uji F dengan nilai Fhitung sebesar 45,074 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti variabel pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan secara simultan Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah menunjukkan nilai Uji ANOVA atau Uji F dengan nilai Fhitung sebesar 100,605 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti variabel pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

Kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan kinerja laporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan transpransi dan akuntabilitas, yang sangat penting untuk kepercayaan publik dan efektivitas pemerintahan.

**Kata Kunci: Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Laporan Keuangan Daerah, Transparansi , Akuntabilitas.**

***ABSTRACT***

***Ukhti Barizun. 2024. Analysis of Regional Financial Management and Performance of Regional Financial Reports in Realizing Transparency and Accountability of Tegal City Government Regional Financial Bodies in 2021-2023***

*This research aims to analyze transparency and accountability in financial management in the Tegal City Government Regional Financial Agency. Realizing a prosperous government must be supported by good financial performance, as well as increasing public demand for transparency and accountability in government financial reporting.*

*This type of research uses quantitative research with a sampling technique using the Slovin formula with a total of 80 respondents. Data was obtained through questionnaires distributed to respondents and analyzed using statistical analysis with the help of SPPS software.*

*The results of this research show that the partial test of regional financial management has a regression coefficient value of 0.111 and a significance value of 0.00 <0.05, which means it has a significant effect on transparency. The partial performance of Regional Financial Reports has a regression coefficient value of 0.260 and a significance value of 0.000 <0.05, which means it has a significant effect on transparency. Partial regional financial management has a regression coefficient value of 0.123 and a significance value of 0.01 <0.05, which means it has a significant effect on accountability. The partial performance of Regional Financial Reports has a regression coefficient value of 0.521 and a significance value of 0.000 <0.05, which means it has a significant effect on accountability. Simultaneously, regional financial management and the performance of regional financial reports show the ANOVA test or F test with a calculated F value of 45.074 and a significance value of 0.000 < 0.05, which means that regional financial management variables and regional financial report performance simultaneously have a significant effect on transparency and simultaneously Regional financial management and the performance of regional financial reports show the ANOVA test or F test with a calculated F value of 100.605 and a significance value of 0.000 <0.05, which means that regional financial management variables and regional financial report performance simultaneously have a significant effect on accountability.*

*The conclusion is that effective regional financial management and quality financial report performance can increase transparency and accountability, which is very important for public trust and government effectiveness.*

***Keywords: Regional Financial Management Analysis, Regional Financial Report Performance, Transparency, Accountability.***

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, hidayah dan karunia-nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Manajamen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan proposal penelitian untuk skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, SE, MM, Akt., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Ira Maya Hapsari, SE., M.Si selaku ketua program studi manajemen dan selaku dosen pembimbing II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Jaka Waskito, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang selalu memotivasi peneliti
4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian.
5. Orang tua, saudara, teman dekat dan pihak-pihak yang sudah membantu, saya ucapkan terima kasih.

Kami menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.



# DAFTAR ISI

# Halaman

HALAMAN JUDUL i

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_bookmark1)

[HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI ii](#_bookmark1)i

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN](#_bookmark1) iv

[HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN](#_bookmark1)

[PUBIKASI v](#_bookmark1)

[ABSTRAK v](#_bookmark1)i

[KATA PENGANTAR x](#_bookmark2)

[DAFTAR ISI xi](#_bookmark3)i

[DAFTAR TABEL xiv](#_bookmark4)

[DAFTAR GAMBAR](#_bookmark5) xvi

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_bookmark6)

* 1. [Latar Belakang Masalah 1](#_bookmark7)
  2. [Rumusan Masalah](#_bookmark8) 7
  3. [Tujuan Penelitian](#_bookmark9) 8
  4. [Manfaat Penelitian](#_bookmark10) 9

[BAB II KAJIAN PUSTAKA](#_bookmark11) 11

1. [Landasan Teori](#_bookmark12) 11
2. [Penelitian Terdahulu 38](#_bookmark13)
3. [Kerangka Pemikiran Konseptual 47](#_bookmark15)
4. [Hipotesis Penelitian](#_bookmark16) 51

[BAB III METODE PENELITIAN 52](#_bookmark18)

1. [Jenis Penelitian 52](#_bookmark19)
2. [Populasi dan Sampel 52](#_bookmark20)
3. [Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 55](#_bookmark22)
4. [Teknik Pengumpulan Data 6](#_bookmark24)2
5. [Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 64](#_bookmark25)
6. [Teknik Analisis Data 64](#_bookmark26)

[BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 7](#_bookmark18)3

1. [Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal 7](#_bookmark19)3
2. [Hasil Penelitian 80](#_bookmark19)
3. [Pembahasan 107](#_bookmark19)

[BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 114](#_bookmark18)

1. [Kesimpulan 114](#_bookmark19)
2. [Saran 114](#_bookmark19)

[DAFTAR PUSTAKA 116](#_bookmark27)

[LAMPIRAN 122](#_bookmark27)

# DAFTAR TABEL

# Tabel Halaman

[Tabel 1 Perkembangan PAD Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023 5](#_bookmark14)

[Tabel 2 Penelitian Terdahulu 42](#_bookmark14)

# [Tabel 3 Daftar Pegawai Badan keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal 53](#_bookmark21)

[Tabel 4 Operasionalisasi Variabel 57](#_bookmark23)

[Tabel 5 Alternatif Pilihan Jawaban 63](#_bookmark23)

[Tabel 6 Sarana dan Prasarana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal 77](#_bookmark23)

[Tabel 7 Pengambilan Kuesioner](#_bookmark23) ..81

[Tabel 8 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Responden ..81](#_bookmark23)

[Tabel 9 Karakteristik Berdasarkan Umur Responden ..82](#_bookmark23)

[Tabel 10 Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden ..83](#_bookmark23)

[Tabel 11 Hasil Uji Validitas Pengelolaan Keuangan Daerah ..84](#_bookmark23)

[Tabel 12 Hasil Uji Validitas Kinerja Laporan Keuangan Daerah ..86](#_bookmark23)

[Tabel 13 Hasil Uji Validitas Transparansi ..87](#_bookmark23)

[Tabel 14 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas ..87](#_bookmark23)

[Tabel 15 Hasil Uji Reliabilitas ..8](#_bookmark23)9

[Tabel 16 Hasil Uji Normalitas Variabel Transparansi ..92](#_bookmark23)

[Tabel 17 Hasil Uji Normalitas Variabel Akuntabilitas ..](#_bookmark23)94

[Tabel 18 Hasil Uji *Multikolonieritas* Transparansi ..95](#_bookmark23)

[Tabel 19 Hasil Uji *Multikolonieritas* Akuntabilitas ..96](#_bookmark23)

[Tabel 20 Model 1 ..99](#_bookmark23)

[Tabel 21 Model 2 100](#_bookmark23)

[Tabel 22 Hasil Uji Parsial (Uji T) Transparansi 102](#_bookmark23)

[Tabel 23 Hasil Uji Parsial (Uji T) Akuntabilitas 102](#_bookmark23)

[Tabel 24 Hasil Uji Simultan (Uji F) Transparansi 104](#_bookmark23)

[Tabel 25 Hasil Uji Simultan (Uji F) Akuntabilitas 105](#_bookmark23)

[Tabel 26 Hasil Uji Koefisien Determinasi 1](#_bookmark23)06

[Tabel 27 Hasil Uji Koefisien Determinasi 106](#_bookmark23)

# DAFTAR GAMBAR

# Gambar Halaman

[Gambar 1 Kerangka Konseptual 51](#_bookmark17)

[Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 76](#_bookmark17)

[Gambar 3 Grafik Histogram Uji Normalitas Transparansi 90](#_bookmark17)

[Gambar 4 *Grafik* *Normal P-P Plot Of Regression Uji Normalitas* 91](#_bookmark17)

[Gambar 5 Grafik Histogram Uji Normalitas Akuntabilitas 93](#_bookmark17)

[Gambar 6 *Grafik Normal P-P Plot Of Regression Uji Normalitas* 93](#_bookmark17)

[Gambar 7 Hasil Uji *Heteroskedastisitas* Transparansi 97](#_bookmark17)

[Gambar 8 Hasil Uji *Heteroskedastisitas* Akuntabilitas 98](#_bookmark17)

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran Halaman**

[Lampiran 1 Lembar Kuesioner 123](#_bookmark17)

[Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tegal 129](#_bookmark17)

[Lampiran 3 Jawaban Responden Variabel Pengelolaan Keuangan](#_bookmark17)

[Daerah 1](#_bookmark17)32

[Lampiran 4 Jawaban Responden Variabel Kinerja Laporan Keuangan](#_bookmark17)

[Daerah 1](#_bookmark17)34

[Lampiran 5 Jawaban Responden Variabel Transparansi 136](#_bookmark17)

[Lampiran 6 Jawaban Responden Variabel Akuntabilitas 138](#_bookmark17)

[Lampiran 7 Hasil Uji Validitas Sampel Responden (X1) 140](#_bookmark17)

[Lampiran 8 Hasil Uji Validitas Sampel Responden (X2) 141](#_bookmark17)

[Lampiran 9 Hasil Uji Validitas Sampel Responden (Y1) 142](#_bookmark17)

[Lampiran 10 Hasil Uji Validitas Sampel Responden (Y2) 143](#_bookmark17)

[Lampiran 11 Hasil Uji Reliabilitas Sampel Responden (X1) 144](#_bookmark17)

[Lampiran 12 Hasil Uji Reliabilitas Sampel Responden (X2) 144](#_bookmark17)

[Lampiran 13 Hasil Uji Reliabilitas Sampel Responden (Y1) 144](#_bookmark17)

[Lampiran 14 Hasil Uji Reliabilitas Sampel Responden (Y2) 145](#_bookmark17)

[Lampiran 15 Hasil Uji Normalitas (Transparansi) 145](#_bookmark17)

[Lampiran 16 Grafik Histogram Uji Normalitas (Transparansi) 146](#_bookmark17)

[Lampiran 17 Grafik](#_bookmark17) *[Normal P-P Plot Of Regression](#_bookmark17)* [Uji Normalitas](#_bookmark17)

[(Transparansi) 146](#_bookmark17)

[Lampiran 18 Hasil Uji Normalitas (Akuntabilitas) 147](#_bookmark17)

[Lampiran 19 Grafik Histogram Uji Normalitas (Akuntabilitas) 147](#_bookmark17)

[Lampiran 20 Grafik](#_bookmark17) *[Normal P-P Plot Of Regression](#_bookmark17)* [Uji Normalitas](#_bookmark17)

[(Akuntabilitas) 148](#_bookmark17)

[Lampiran 21 Hasil Uji](#_bookmark17) *[Multikolonieritas](#_bookmark17)* [(Transparansi) 148](#_bookmark17)

[Lampiran 22 Hasil Uji](#_bookmark17) *[Multikolonieritas](#_bookmark17)* [(Akuntabilitas) 149](#_bookmark17)

Lampiran 23 Hasil Uji *Heteroskedastisitas* (Transparansi) 149

Lampiran 24 Hasil Uji *Heteroskedastisitas* (Akuntabilitas) 150

Lampiran 25 Model 1 150

Lampiran 26 Model 2 151

Lampiran 27 Hasil Uji T (Transparansi) 151

Lampiran 28 Hasil Uji T (Akuntabilitas) 151

Lampiran 29 Hasil Uji F (Transparansi) 152

Lampiran 30 Hasil Uji F (Akuntabilitas) 152

Lampiran 31 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Transparansi) 152

Lampiran 32 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Akuntabilitas) 152

Lampiran 33 Dokumentasi 153

# BAB I

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang Masalah

# Salah satu tujuan pemerintahan adalah menciptakan tata kelola yang baik. Semua upaya buat mencapai tujuan tersebut harus didukung dengan kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan yang optimal juga penting untuk mempertahankan keseimbangan antara program pemerintah dan pelaksanaan anggaran yang sudah direncanakan dalam APBD. (Sadjiarto, 2000).

Pemerintahan yang efektif perlu mengusung semangat reformasi aparatur negara serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pembangunan berjalan dengan lancar dan terkoordinasi. Selain itu, masyarakat meminta agar pemerintah benar-benar berusaha memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga pemerintahan menjadi transparan dan mampu menyediakan barang serta jasa publik sesuai ekspektasi masyarakat. (Ludani, 2017).

(Anggadini, 2021), Masyarakat saat ini semakin menginginkan pemerintahan yang efektif. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus meningkatkan kinerjanya. Hal ini karena laporan keuangan adalah alat untuk menerangi seberapa baik pemerintah beroperasi atau tidak. Laporan keuangan harus memiliki relevansi, kredibilitas, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. (Anggadini, 2021), Agar meningkatkan kualitas Laporan keuangan yang disusun dengan standar akuntansi sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja laporan serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah guna mencapai *Good Governance*.

Tercapainya *Good Governance* adalah kebutuhan utama untuk memenuhi harapan masyarakat, dengan adanya pemerintahan yang baik yang dapat mendaptkan tujuan dan cita-cita negara. Untuk mencapai hal ini, perlu dikembangkan dan dilaksanakan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas, dan nyata. Dengan cara ini, pemerintahan dapat terlaksana secara efektif., efisien, bersih, bertanggung jawab, serta bebas dari pelanggaran hukum. (Yuliana, 2013)

Para ahli setuju bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, konspirasi, dan nepotisme (KKN) adalah kunci dari pemerintahan yang baik. Tanpa pemberantasan KKN, konsep pemerintahan yang baik tidak bisa tercapai. Akibatnya, pemerintah daerah harus sangat memperhatikan pengelolaan keuangan dan anggaran mereka. Setiap tindakan yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan termasuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan, serta tanggung jawab keuangan dan pengawasan. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pelaporan. (Ludani, 2017), Suatu tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pengelolaan keuangan daerah dan keuntungan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Semua lembaga pemerintah pusat dan daerah harus menyusun laporan keuangan karena mereka bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah telah berubah. Salah satu contoh perubahan ini adalah meningkatnya kesadaran publik bahwa pemerintahan yang mengelola keuangan daerah harus bersih, akuntabel, dan transparan, (Ludani, 2017).

Laporan keuangan daerah berperan penting dalam memahami posisi keuangan sebuah organisasi dan memastikan kelangsungan operasionalnya. Selain itu, laporan keuangan menyediakan informasi sangat berharga. Bukti transparansi dan akuntabilitas suatu perusahaan. Laporan keuangan biasanya mencakup rincian keadaan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan arus kas, yang membantu pengguna dalam memutuskan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya dan dalam mengevaluasi penilaian tersebut. Di dalamnya termasuk neraca, realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan keuangan. Uang tunai, dokumen, dan laporan keuangan berkualitas dapat membantu mengambil kebijakan pemerintah yang akan datang, (Hehanussa, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa segala hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai, termasuk harta kekayaan yang memuat hak dan kewajiban tersebut, menentukan keuangan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga memperjelas hal itu segala sesuatu yang boleh dinilai dengan uang dan menjadi milik daerah termasuk dalam keuangan daerah, begitu pula segala hak dan kewajiban yang dimiliki daerah. pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Syam & Zulfikar, 2022).

(Heny & Nurdin, 2018), Dengan kebebasan dan transparansi, akuntabilitas dan transparansi dapat tumbuh dan berkembang dalam memberikan tanggapan. Maka, pemerintah perlu sepenuhnya menyadari bahwa integritas dalam pemerintahan dan pelayanan publik adalah kunci untuk meningkatkan Keterbukaan dan akuntabilitas keuangan di tingkat daerah. Ini akan menjadi lebih baik tata kelola pemerintahan serta memastikan kelancaran pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana masyarakat saat kepercayaan terhadap pemerintah meningkat. Salah satu bagian pemerintahan adalah Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal. (Heny & Nurdin, 2018),

Dalam situasi ini pemerintah harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta untuk mencapai tujuan Pemerintah harus menerapkan perubahan dalam cara penyajian laporan keuangan guna memperbaiki penatausahaan keuangan negara, baik nasional maupun daerah. Artinya, pemerintah harus mampu memberikan akses kepada masyarakat luas terhadap seluruh data keuangan terkait secara jujur ​​dan terbuka. dengan laporan keuangan yang komprehensif dan mudah diakses menentukan sejauh mana akuntabilitas dan transparansi, (Priharjanto & Hadiwibowo, 2021).

Proses akuntabilitas yaitu tanggungjawab pemerintah sering mengalami masalah masih belum sesuai dengan harapan masyarakat umum. Ada tiga komponen utama akuntabilitas secara teoritis yaitu verification, responsibility, Dan tanggung jawab menjawab. Ini mencakup alat-alat akuntabilitas yang mencakup tindakan pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, ada tren di mana konsep akuntabilitas sering kali lebih fokus pada legalitas, prosedur, dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih daripada pada keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat umum. (Ludani, 2017).

Setiap warga negara berhak mengetahui, atau memiliki pengetahuan, tentang semua tindakan yang berkaitan dengan Pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dilakukan oleh pejabat negara. Jika ada transparansi, yang berarti setiap warga negara diharapkan dapat secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif politik pemerintah, (Oktavia, 2016)

Untuk mencapai pemerintah yang baik tersebut maka perlunya diperhatikan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, tampak dalam laporan Realisasi Anggaran Kota Tegal, yang belum sepenuhnya dikembangkan dari PAD, yang rentan terhadap perubahan drastis. Contoh PAD Kota Tegal tahun 2021–2023 berikut:

***Tabel 1***

***Perkembangan PAD Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Target Penerimaan | Realisasi |
| 2021 | Rp 317,488.238.500 | Rp 308.116.840.289 |
| 2022 | Rp 381.994.269.000 | Rp 340.054.969.233 |
| 2023 | Rp 416.655.985.729 | Rp 336.824.698.863 |

Sumber: LRA dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tegal

Dalam tabel dijelaskan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal selama periode 2021-2023. Data menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target penerimaan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tegal, di mana realisasi penerimaan selalu berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, target penerimaan sebesar Rp 317.488.238.500 hanya terealisasi sebesar Rp 308.116.840.289. Situasi serupa terjadi pada tahun 2022 dan 2023, dengan realisasi masing-masing Rp 340.054.969.233 dan Rp 336.824.698.863, meskipun target yang ditetapkan meningkat setiap tahunnya. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta kinerja laporan keuangan yang dapat berdampak pada tingkat transparansi dan akuntabilitas di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan dana publik yang baik.

Penerapan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan gagasan tentang tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya keuangan, diharapkan akan menghasilkan pemerintahan regional yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan menjaga akurasi kinerja keuangan pemerintah daerah, diharapkan pemerintah dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam setiap aktivitasnya, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga akan mendorong para pengelola pemerintahan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, menghasilkan kinerja pemerintahan yang lebih baik secara keseluruhan. (Shofiyah et al., 2023).

# Rumusan Masalah

* 1. Apakah pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023?
  2. Apakah kinerja laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023?
  3. Apakah pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023?
  4. Apakah kinerja laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023?
  5. Apakah pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023?
  6. Apakah pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023?

# Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui apakah kinerja laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023.
3. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023.
4. Untuk mengetahui apakah kinerja laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023.
5. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023.
6. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal Tahun 2021-2023.

# Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

* + 1. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.
    2. Berfungsi sebagai acuan dan tambahan informasi bagi pembaca, serta sebagai materi yang digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan peneliti dengan menerapkan teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan.

1. Bagi Badan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota Tegal

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi pedoman dan contoh bagi pemerintah Kota Tegal untuk membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel di masa depan.

* + 1. Bagi Universitas Pancasakti Tegal

Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pelaporan keuangan Pemerintah Kota Tegal.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

# Landasan Teori

* 1. Tinjauan atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah
     1. Pengertian pengelolaan keuangan daerah

Untuk melaksanakan proses otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah itu bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah harus memiliki kemampuan untuk mengelola atau mengelola dana yang ada. Ini akan memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan daerah. (Hutagalung, 2016), Pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk operasional pemerintahan. Sebagai pengambil keputusan, pemerintah perlu mampu mengelola anggaran daerahnya secara efektif. Kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum akan terjadi secara cepat apabila pemerintah menjalankan manajemen keuangan daerahnya dengan optimal. Otonomi daerah seharusnya memungkinkan daerah untuk lebih maju. Namun, penggunaan anggaran tidak efisien, sehingga belanja daerahnya tidak tepat di tempat yang seharusnya. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat utama untuk mengawasi pembangunan sosial ekonomi, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kualitas. (Hutagalung, 2016).

Pengaturan pengelolaan keuangan daerah dijelaskan Menurut Undang-Undang Federal Nomor 13 tahun 2006, yang berlaku pada tanggal 15 Mei 2006, yang telah mengalami beberapa revisi, sesuai dengan revisi Undang-Undang Federal No. 21 Tahun 2011, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2011.. Strategi untuk pengelolaan keuangan daerah meliputi kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat. (Farida, 2016).

Secara tertib berarti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan teratur dan tepat waktu, dipengaruhi oleh lembaga administrasi yang diawasi. Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan menunjukkan daerah harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. (Farida, 2016). efektivitas adalah menunjukkan seberapa berhasil sebuah program mencapai tujuannya sesuai mengingat tujuan yang telah ditetapkan, dengan membandingkan hasil dengan hasil yang diharapkan. Di sisi lain, efisiensi mengacu pada mencapai hasil output yang optimal dengan menggunakan jumlah masukan yang minimal atau meminimalkan pemanfaatan input untuk memenuhi tujuan tertentu. Untuk menggunakan konsep ekonomi, input harus diperoleh baik secara kuantitas maupun kualitas. yang diperlukan, namun dengan biaya yang seminimal mungkin. Transparansi mengacu pada konsep transparansi yang memungkinkan masyarakat umum melihat data mengenai keuangan daerah sejelas-jelasnya. Bertanggung jawab berarti seseorang memiliki kewajiban untuk memastikan administrasi sumber daya dan penegakan kebijakan yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan mencakup distribusi yang adil dari kewenangan dan pendanaan, serta objektivitas digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban. Perilaku dan sikap yang pantas dan seimbang disebut dengan kepatutan. Keuntungannya bagi masyarakat adalah itu dana publik didistribusikan secara utama untuk memenuhi kebutuhan mereka. (Farida, 2016).

(Mardiasmo, 2002), menguraikan pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh proses yang mencakup perencanaan, implementasi, pencatatan, pelaporan, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap keuangan daerah (Perda No. 7 tahun 2008). disajikan ekonomi lokal (Perda No. 7 Tahun 2008). prinsip-prinsip utama pengelolaan keuangan daerah berikut ini:

* + - 1. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan berperilaku dengan cara yang konsisten dengan kekuasaannya. Kebijakan harus dapat diakses dan disampaikan dengan baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai hal ini., serta implementasinya.

* + - 1. *Value for money*

Penganggaran dan pengelolaan uang yang efektif di daerah merupakan landasan penting menuju pemerintahan yang berkualitas. Penerapan nilai-nilai dalam pengelolaan dana publik menjadi krusial, dengan fokus pada efektivitas kerangka pengelolaan anggaran dan keuangan daerah..

* + - 1. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik

Memiliki pegawai yang jujur ​​dan bermoral sangat penting bagi pengelola keuangan daerah untuk meminimalkan risiko korupsi.

* + - 1. Transparansi

Keterbukaan pemerintah terhadap proses pembuatan kebijakan keuangan daerah memungkinkan masyarakat dan dewan perwakilan untuk memahami serta mengawasinya. Ini akan berkontribusi pada terciptanya tanggung jawab saling mengawasi antara pemerintahan daerah dan membantu pembentukan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab, transparan, efektif, dan efisien yang tanggap terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat.

* + - 1. Pengendalian

Pendapatan dan pengeluaran daerah (APBD) harus diperiksa secara teratur, yaitu untuk membandingkan apa yang diharapkan dengan apa yang telah dicapai. Akibatnya, perlu dilakukan analisis perbedaan atau perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran daerah. Hal ini dilakukan untuk menemukan dengan cepat apa yang menyebabkan perbedaan tersebut terjadi dan tindakan antisipasi kedepan.

* + - 1. Komprehensif dan disiplin

Anggaran daerah merupakan satu-satunya alat yang digunakan dalam pengambilan keputusan, sehingga perlu disusun secara cermat dan komprehensif. untuk menemukan masalah, menganalisis perbedaan, dan menyelesaikan analisis. Problem yang mungkin muncul, menilai kemampuan kelembagaan, dan menemukan yang terbaik untuk menyelesaikannya.

* + - 1. Fleksibilitas

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan keleluasaan yang memadai hingga tingkat saat ini sesuai dengan informasi yang relevan. Meskipun dasar yang teguh diperlukan, itu harus diberikan dengan hati-hati agar tidak mengganggu upaya dan proyek lokal..

* + - 1. Terprediksi

Kebijakan yang dapat diprediksi sangat penting untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran untuk daerah. Meskipun demikian, peraturan dapat berubah; salah satu contohnya adalah tata cara pengalokasian DAU, menimbulkan ketidakpastian yang sangat besar di daerah, sehingga prinsip tentang seberapa efektif dan efisien program yang didanai oleh anggaran daerah sering diabaikan.

* + - 1. Informasi

Oleh karena itu, pelaporan berkala mengenai biaya, keluaran, dan konsekuensi kebijakan sangat penting sebagai landasan bagi integritas dan proses pengambilan keputusan yang tepat. (Haryanto, 2007), perimbangan antara sumber pembelanjaan dan terbatasnya lingkup kewajiban pemerintah daerah, membutuhkan penentuan jenis dan jumlah pelayanan serta pembangunan yang tepat dan efisien dalam pemanfaatan dana. Hasilnya adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan melalui melangkah maju dan menyelidiki pilihan yang tersedia penerimaan daerah seharusnya dikelola secara efektif dan efisien, terdapat juga masalah dalam pengelolaanya.

* 1. Tinjauan atas kinerja laporan keuangan pemerintah daerah

1. kinerja laporan keuangan daerah

Laporan keuangan daerah menyajikan data keuangan yang mencakup data pembiayaan, belanja, dan investasi dari aktivitas pemerintah. Untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bebas dari penyimpangan, akuntabilitas dan transparansi memastikan bahwa pemimpin daerah dapat diandalkan dan bertanggung jawab dalam mengawasi dana publik yang dipercayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Besarnya uang yang dikeluarkan untuk kemajuan dan kemajuan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan setiap sennya kepada pemerintah. kebaikan mereka sendiri. (Orangbio et al., 2017).

Baik secara lisan maupun tertulis, pemerintah daerah harus menunjukkan akuntabilitas atas dana publik yang mereka terima. Diantara metodenya untuk bertanggung jawab tertulis atas kinerja keuangan adalah dengan menyerahkan laporan keuangan. Laporan keuangan disampaikan kepada pemangku kepentingan oleh pemerintah daerah sebagai sarana tanggung jawab fiskal. Administrasi lokal mempublikasikan laporan keuangan karena dua alasan utama. Pertama, Secara internal, laporan keuangan berguna untuk menelusuri dan mengevaluasi efektivitas keseluruhan pemerintah daerah dan departemennya, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. (Armando, 2013).

Baik pihak internal maupun eksternal membuat dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemangku kepentingan eksternal tersebut antara lain organisasi pemberi hibah, kreditor, investor, serta Inspektorat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Laporan keuangan digunakan untuk membuat kebijakan ekonomi, sosial, dan politik oleh pemerintah daerah dan pihak yang terlibat (Mahmud, 2005). Oleh karena itu, Informasi keuangan harus diungkapkan secara independen dan bersamaan dengan laporan keuangan secara tepat waktu dan dapat dipercaya. Namun apakah mereka menginginkan pemerintahan yang jujur ​​dan transparan. Apakah mungkin bagi pemerintah daerah untuk menangani keuangan. Kepala Daerah dan pejabat SKPD lainnya harus memberikan jawaban yang positif atas pertanyaan tersebut.

Salah satu manfaat transparansi adalah Berikan data agar kinerja keuangan pada awal tahun anggaran dapat dibandingkan. dengan yang direncanakan (Albugs, 2016). Selain itu, transparansi ini juga dapat digunakan untuk menilai apakah ada korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, menilai tingkat kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang harus mereka lakukan.

(office of government commerce, 2009), Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010, agar informasi akuntansi dapat mencapai tujuannya, maka aspek kualitatif pelaporan keuangan harus diwujudkan sebagai pengukuran normatif. Agar laporan keuangan dianggap sah, harus memenuhi empat persyaratan normatif berikut mencapai tujuannya.

1. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menentukan apakah pemerintah daerah "sehat atau sakit", tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah harus dilihat dari kondisi informasi dimasukkan dalam laporan keuangan daerah. Selanjutnya, tujuan dari pelaporan keuangan dari pemerintah kota adalah untuk memfasilitasi Membuat keputusan politik, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan pemerintahan dan menawarkan instrumen akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, tujuan pemaparan adalah untuk mengevaluasi efektivitas pimpinan SKPD, pemerintah, dan lembaga pemerintah lainnya. (Daniel & Yohanes, 2014).

Menurut Laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimaksudkan untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengevaluasi keterbukaan dan akuntabilitas kebijakan yang digunakan untuk menciptakan inisiatif sosial, politik, dan ekonomi. Laporan ini juga menunjukkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya keuangan, tanggung jawab dan kesetaraan pemerintah daerah, serta status dan perubahan sumber daya keuangan dan kepatuhan terhadap rencana anggaran. Selain itu, laporan ini membahas bagaimana entitas pelaporan mendanai operasi pemerintah dan memenuhi kebutuhan dana cair; kemampuan pemerintah dalam mendukung program masyarakat dan operasional pemerintah; dan penilaian kebijakan mengenai kapasitas pemerintah daerah dan SKPD untuk memenuhinya operasi mereka (Juwita, 2013).

1. Pengukuran Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
   * + 1. Rasio kemandirian keuangan daerah

Kapasitas pemerintah daerah untuk mendanai inisiatif, proyek, dan layanan mereka sendiri kepada penduduk yang telah menyumbangkan pajak dan retribusi sebagai sumber keuangan yang diperlukan daerah tersebut dikenal sebagai rasio kemandirian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan bahwa angka yang lebih tinggi menunjukkan kemandirian fiskal daerah (DORI SAPUTRA, 2014).

* + - 1. Derajat desentralisasi fiskal

Mahmud (2005), Tingkat desentralisasi dapat dihitung dengan membandingkan total pendapatan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah ditunjukkan dengan rasio ini. Kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan desentralisasi meningkat seiring dengan besarnya masukan PAD.

* + - 1. Efisiensi belanja daerah

Anggaran dan pengeluaran aktual dibandingkan untuk mendapatkan rasio efisiensi pengeluaran. Ini digunakan untuk menghitung jumlah penghematan yang dicapai pemerintah dalam anggaran (Mahmud, 2005).

* + - 1. Rasio ketergantungan keuangan daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah yang ditentukan dengan membandingkan pendapatan transfer dengan penerimaan atau pendapatan daerah secara keseluruhan, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Rasio yang lebih besar menunjukkan seberapa besar ketergantungan suatu pemerintah daerah terhadap pemerintah federal atau provinsi. (Chandra et al. 2019)

* 1. Transparansi dan Akuntabilitas

a. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks tata pemerintahan yang baik. Transparansi dan keterbukaan dalam peradilan umum yang dilakukan oleh organisasi atau pejabat tata usaha negara merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini disebabkan perlunya organisasi atau pejabat tata usaha negara memberikan informasi mengenai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan atau keputusan penyelenggaraan negara secara terbuka dan transparan. (Safran, 2020).

Ciri pemimpin yang baik adalah transparansi. Secara harafiah, transparansi adalah “terbuka” dalam arti luas. Informasi publik mengenai pemerintah tersedia. dengan cara yang mudah dan akurat. (Pertiwi, 2023). Secara harfiah, transparansi adalah keterbukaan yang jelas. Oleh karena itu, transparansi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang bagaimana suatu tugas tertentu dilaksanakan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, transparansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam menciptakan kebijakan pemerintah yang efektif. Transparansi dalam setiap perjanjian pinjaman dapat ditingkatkan kesetaraan. Selain itu, menurut penjelasan yang dikutip oleh Tahir (2011), transparansi berarti bahwa berbagai Pihak-pihak yang berkepentingan dengan politik, organisasi, dan pembuatan kebijakan dapat memahaminya perusahaan.

1. Organization for Economic Development and Cooperation (Demse, 2006), transparansi adalah elemen penting dalam sistem pemerintahan. Transparansi harus menentukan latar belakang utama kegiatan pemerintah. Kepemimpinan publik membutuhkan peningkatan keterbukaan. Pada dasarnya, hal ini berkaitan dengan kelompok masyarakat. yang lebih cepat berkembang dan lebih berpengaruh, karena kebutuhan publik akan transparansi meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Terbuka terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah berarti bersikap transparan. Transparansi dalam domain manajemen mengacu pada sikap akomodatif terhadap perencanaan acara. Tanda-tanda itu bisa digunakan untuk mengukur transparansi adalah sebagai berikut (Adillah, 2017):
2. mekanisme untuk menjamin standarisasi dan transparansi proses pelayanan publik;
3. mendorong mekanisme di mana warga dapat mengajukan pertanyaan tentang berbagai kebijakan, layanan, dan sektor publik dan
4. Sistem yang mendukung pelaporan informasi, pembagian informasi, dan tindakan terkait layanan pejabat publik.

(Mardiasmo, 2002), Pembagian informasi secara terbuka oleh pemerintah disebut dengan transparansi kepada orang-orang yang membutuhkan tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik. Untuk pemangku kepentingan yang membuat keputusan, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan informasi, termasuk informasi keuangan. (Tahir 2011), proses transparansi terdiri dari:

1. Standar memerlukan partisipasi masyarakat dalam tata cara pembuatan peraturan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
2. persetujuan adalah proses di mana pemerintah dan masyarakat berbicara satu sama lain.

Untuk mencegah korupsi, hak banding sangat penting dalam proses pengawasan; peraturannya jelas dan tidak berbelit-belit. (Tarja 2011), transparansi berarti bahwa orang umum harus memiliki akses yang tidak terbatas dan mudah terhadap informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Transparansi adalah penyebaran informasi yang dilakukan pemerintah secara terbuka kepada semua pihak terkait mengenai inisiatif pengelolaan sumber daya publik membutuhkannya. Dengan kata lain, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan data yang diperlukan untuk memudahkan prosedur pelayanan masyarakat. Ada empat tahap yang diperlukan untuk menerapkan prinsip keterbukaan (Winarsih, 2006):

1. Tata cara Pelayanan
2. Prosedur kerja atau kumpulan operasi terkait yang secara jelas menggambarkan dan dan tegas langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melaksanakan layanan. Proses Pelayanan publik harus lugas, mudah digunakan, dan mudah dipahami, dan digambarkan dalam diagram flow. Karena berfungsi sebagai berikut, Diagram alur sangat penting untuk menyediakan layanan publik:
3. Instruksi tenaga kerja untuk pemasok jasa; data bagi pengguna layanan dan
4. Publikasi media publik tentang metode pemberian layanan kepada klien di semua unit kerja pelayanan
5. Penggerak untuk membangun program dan prosedur yang efektiv
6. otoritas pengawas dan pengendali publik serta rujukan bagi mengevaluasi dan memeriksa konsistensi pelaksanaan tugas
7. Standar Pelayanan Publik

Untuk menjamin kepastian tujuan pelayanan, Sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya, unit layanan dari berbagai lembaga akan membuat dan menerbitkan standar layanan mereka sendiri. Standar pelayanan merupakan tolok ukur untuk mengukur kualitas kinerja yang harus dipenuhi oleh pemberi atau penerima layanan pada saat pelayanan publik diselenggarakan. Karena hal ini menjamin bahwa klaim yang dibuat oleh penyedia layanan dapat disimpan dan dapat dimengerti oleh pengguna layanan, persyaratan ini harus masuk akal.

1. Keterbukaan Proses Pelayanan

Masyarakat dapat terlibat dalam urusan pemerintahan dan berkontribusi serta menerima informasi bila ada transparansi. Selain itu, transparansi dapat mengaburkan batas-batas negara. Batasan suatu negara menjadi kehilangan makna karena rumitnya informasi dan teknologi. Seseorang dapat dengan mudah menawarkan dan menerima informasi sesuai dengan kesukaannya. Suatu metode pemberian layanan dianggap unggul jika seluruh komponennya termasuk persyaratan, biaya dan waktu, metode layanan, serta hak dan kewajiban penyedia layanan dan pengguna layanan dapat diakses dan dipahami oleh publik.

1. Kemudahan Memperoleh Informasi

Kesusahan mendapatkan rincian didefinisikan sebagai seberapa sulit masyarakat mengumpulkan data, menggunakan cara langsung atau tidak langsung. Informasi yang dapat diakses secara langsung adalah informasi yang dapat diperoleh melalui hubungan dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan rinician yang diperlukan. Info tidak langsung adalah info yang diperoleh melalui pihak, seperti iklan dan brosur. Transparansi pelayanan publik berarti bahwa setiap Pengguna dan pihak berkepentingan yang memerlukannya cukup melihat beberapa komponen proses penawaran layanan. Transparansi dalam praktik penyedia layanan dapat dicapai jika masyarakat umum mengetahui seluruh komponen proses pemberian layanan, termasuk kebutuhan, harga dan waktu yang diperlukan, teknik layanan, serta hak dan kewajiban penyedia layanan. (Pertiwi, 2023).

b. Akuntabilitas

1. Pengertian akuntabilitas

Di Indonesia, gagasan tanggung jawab bukanlah hal baru. Konsep tanggung jawab ditekankan pada hampir semua entitas pemerintah, terutama dalam menjalankan tugas administratif. Akuntabilitas publik menunjukkan bahwa organisasi selalu siap menerima pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil oleh masyarakat umum. Namun, mereka yang melakukan kontrol mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat dari pada untuk kepentingan kelompok atau golongan (Arif et al., 2022).

Akuntabilitas berarti bertanggung jawab secara teratur atas keberhasilan atau kegagalan tujuan organisasi (Pratiwi, 2014). Tanggung jawab publik, dalam definisi paling mendasarnya, adalah kapasitas untuk bereaksi terhadap individu sehubungan dengan kinerja yang diharapkan. Tingkat kontrol organisasi terhadap lembaga-lembaga publik dikenal dengan istilah akuntabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi kepada siapapun yang berkepentingan untuk menilai tindakan organisasi, baik secara internal maupun eksternal. (Wicaksono, 2015).

1. Akuntabilitas adalah istilah yang menyinggung sistem tanggung jawab yang memungkinkan pengawasan. Untuk melakukan hal ini, kewenangan didistribusikan ke beberapa departemen pemerintah, yang mana lebih rendah konsentrasi kekuasaan dan menciptakan lingkungan di mana semua pihak melihat satu sama lain. Disarankan untuk membuat sistem akuntabilitas untuk meningkatkan definisi tugas, tanggung jawab, dan hasil akhir.
2. Metode yang dapat dilihat
3. Pengukuran tingkat keberhasilan kinerja
4. Konsultasi publik dan implasi

(Daud Soeharso, 2017), Akuntabilitas artinya penyelenggara acara publik wajib menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan terkait proses dan langkah pengambilan keputusan bertanggung jawab atas hasilnya. Observasi kinerja mereka. Fungsi akuntabilitas yang lebih besar lebih dari sekadar mematuhi peraturan perundang-undangan itu juga berfokus tentang penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, dan ekonomis akuntabilitas harus ditekankan dalam manajemen pemerintahan dan bisnis.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai memberikan pertanggungjawaban atau menanggapi serta menjelaskan kinerja seseorang, organisasi, atau individu untuk pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta informasi atau otoritas atau perlakuan (Risya Umam, 2017).

Mardiasmo (2002), sistem akuntabilitas publik adalah tanggung jawab ini berarti memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mempublikasikan aktivitas apa pun yang terkait dengan sistem wali amanat yang berhak dan berwenang untuk memintanya. Ketika suatu organisasi diberi suatu pekerjaan, akuntabilitas adalah kewajibannya untuk memenuhi wewenang, tugas, dan fungsi serta menggunakan sumber dayanya keuangan, manusia, fasilitas, dan infrastruktur untuk mencapai tujuan dan sasarannya organisasi, (Novitaningrum, 2014).

1. kinerja pemerintahan daerah

Kinerja organisasi atau pemerintah adalah ukuran tingkat pencapaian yang dapat dicapai dan menunjukkan perilaku dan keberhasilan anggota organisasi. Kinerja juga dapat digambarkan sebagai hasil (atau produk) dari berbagai proses yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi dalam kaitannya dengan sumber (atau masukan) tertentu. (Kurnia, 2013).

Sebagaimana dinyatakan dalam pengukuran kinerja menjadi landasan untuk menentukan dilakukan atau tidaknya tindakan, sesuai aturan pembuatan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berhasil memenuhi tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk membantu organisasi pemerintah memenuhi misi dan visinya. Hal ini mendukung pandangan Said (2015:9) bahwa ada beberapa pilihan manajemen dipengaruhi oleh komitmen kontrak, kendala sumber daya, batasan teknis, dan batas pemerintah. Untuk meningkatkan nilai, Manajer perlu memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta bagaimana berbagai hambatan eksternal mempengaruhi kapasitas perusahaan untuk mencapai tujuannya. Manajer menggunakan metrik kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan pengambilan keputusan. Tujuan dan sasaran juga diukur melalui pengukuran kinerja yang terdiri dari elemen penting seperti:

1. Penetapan tujuan dan perencanaan.
2. Pembuatan kebijakan terkait.
3. Pelaporan hasil resmi.
4. Penggunaan informasi.

Evaluasi kinerja pemerintah bukanlah suatu perkembangan terkini (Kurnia, 2013). Telah diminta kepada seluruh departemen, satuan kerja, dan satuan pelaksana tugas untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi utama secara berkala secara triwulan, semester, atau tahunan. Selain itu, ada saat-saat di mana lembaga memberikan laporan tentang hasil dari program yang mereka jalankan. Output ini dapat mencakup informasi seperti jumlah kilometer jalan dan jembatan yang dibangun, jumlah imigran yang direlokasi secara efektif, serta informasi lebih lanjut. Meskipun pelaporan informasi masukan dan keluaran tidak penting, penekanan pelaporan saat ini adalah pada hasil yang dicapai dibandingkan kuantitas sumber daya yang digunakan ketika menilai kinerjanya.

Kinerja organisasi pemerintah dapat digambarkan sebagai penjelasan mengenai visi, tujuan, dan strategi organisasi yang mencakup uraian pencapaian tujuan atau sasaran, yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan operasional sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/BPPK Kementerian Keuangan (2014) dan Chabb & Suripto (2011), “gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan rencana strategis” itulah yang dimaksud dengan kinerja pemerintah daerah. Sejauh mana kegiatan, program, atau kebijakan diterapkan untuk mencapai tujuan, sasaran, tujuan, dan visi organisasi dikenal sebagai kinerja pemerintah daerah. (Mahsun, 2006).

* 1. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja keuangan daerah

Salah satu komponen penting dari pengawasan manajemen di sektor publik adalah pengukuran kinerja. Dilakukannya evaluasi kinerja pada entitas sektor publik untuk tujuan tertentu (Mahmud, 2005).

* + 1. Menentukan tingkat pencapaian tujuan perusahaan Tinjauan kinerja berfungsi sebagai tolok ukur. seberapa jauh organisasi telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan apakah organisasi bergerak ke arah yang benar atau menyimpang dari tujuan tersebut.
    2. Memberi pegawai cara untuk belajar. Pengukuran kinerja memberikan pegawai cara untuk mengubah perilaku, sikap, kemampuan, atau pengetahuan seseorang kerja mereka untuk mendapatkan hasil kerja yang sebesar-besarnya.
    3. Naikkan output untuk jangka waktu berikutnya. Kinerja diukur mengetahui bagaimana meningkatkan kinerja dalam waktu yang akan datang.
    4. Mengambil pertimbangan sistematis tentang menjatuhkan sanksi dan insentif. Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk memberikan landasan metodis bagi para manajer untuk memberikan insentif seperti kenaikan gaji dan promosi, atau menghukum mereka dengan hal-hal seperti memberhentikan atau menunda kemajuan.
    5. Mendorong anggota staf. Anggota staf yang berkinerja tinggi dapat diberi penghargaan melalui evaluasi kinerja dan manajemen gaji. Insentif ini mendorong anggota staf untuk bekerja lebih keras.
    6. Menetapkan tanggung jawab publik. Penilaian akuntabilitas didasarkan pada pengukuran kinerja, termasuk kinerja finansial organisasi dan kinerja manajemen.

(Mardiasmo, 2002), manfaat bagi instansi pemerintah, pengukuran kinerja merupakan hal yang penting sebagai berikut:

1. Mendidik anggota staf tentang kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen;
2. Memberikan panduan tentang cara mencapai tujuan kinerja;
3. Melacak dan menganalisis pencapaian kinerja, membandingkannya dengan target kinerja, dan mengambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja;
4. Menjadi dasar untuk sistem pengukuran kinerja yang disepakati memberikan insentif dan sanksi yang tidak memihak atas keberhasilan yang ditentukan oleh sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
5. Membantu bawahan berkomunikasi dengan pimpinan tentang cara memperbaiki kinerja organisasi; dan
6. Berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi.
7. Metode untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah

Tidak ada satu ukuran pun yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keseluruhan organisasi sektor publik karena kinerja organisasi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Indikator kinerja akan mempunyai pengaruh besar terhadap elemen penentu keberhasilan yang dipilih. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik harus dibuat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karena sifatnya yang multidimensional. (Mahsun, 2006), ada empat cara untuk mengukur efektivitas organisasi di sektor publik. Keempat cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Salah satu metode pengukuran kinerja adalah analisis anggaran, yang dilakukan dengan membandingkan anggaran. Hasilnya dapat berupa selisih lebih (varian yang menguntungkan) atau kurang variasi. Pendekatan ini berkonsentrasi pada seberapa baik input yang berkinerja baik dan menguntungkan secara finansial. Laporan dan Anggaran realisasi adalah data yang digunakan sebagai dasar analisis.
2. Analisis rasio laporan keuangan: alat untuk Analisis laporan keuangan adalah proses mengidentifikasi permasalahan dan kemungkinan dalam laporan keuangan. Perhitungan rasio keuangan seperti likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan rasio pasar menjadi landasan pengukuran kinerja. Rasio likuiditas mengevaluasi kapasitas suatu entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dan rasio aktivitas menilai seberapa efektif penggunaan sumber daya dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas sumber daya. Rasio solvabilitas mengevaluasi kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen jangka panjang.
3. Metode Balanced Scorecard mengukur kinerja ditentukan oleh faktor non-finansial dan finansial. Empat sudut pandang finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran-inovasi digunakan dalam pengukuran.
4. Audit kinerja, juga dikenal sebagai pengukuran nilai uang, adalah proses mengukur dan menganalisis kinerja menggunakan metrik yang berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran memungkinkan para ekonom menilai seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan. Efektivitas, di sisi lain, diukur dengan mengukur seberapa tepat metode dimanfaatkan, yaitu melalui perbandingan input-to-output. Di sisi lain, efektivitas ditentukan dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan untuk menentukan bagaimana tepatnya tujuan tersebut dicapai.
5. Indikator kinerja pemerintah daerah

Seperti yang dinyatakan oleh (Abdullah, 2017), ada beberapa komponen yang bertanggung jawab atas pengukuran kinerja, antara lain:

* 1. Ekonomi
  2. Efisien
  3. Efektifitas

Adapun penjelasan dari indikator di atas:

1. Ekonomi: Ekonomi menggambarkan hubungan antara pasar dan input, atau biaya masukan. Secara sederhana, ekonomi mencakup proses membeli barang dan jasa dengan metode tertentu, mencapai tingkat kualitas tertentu dengan harga yang paling kompetitif (Mardiasmo, 2002). Mahmud (2005) mendefinisikan ekonomi sebagai perbandingan antara input utama (kas) dan input sekunder (bahan baku, personel, dan infrastruktur). Ukuran ekonomi digunakan dalam konteks organisasi pemerintah untuk menggambarkan beberapa komponen penting yang ditetapkan untuk mendukung aktivitas saat ini. Pengeluaran sumber daya dianggap efisien ketika lebih rendah dari anggaran yang tersedia, sedangkan pemborosan terjadi jika anggaran melebihi kebutuhan yang sebenarnya.
2. Efisiensi adalah bagian penting dari ketiga poin tentang nilai uang. Rasio input dan output menentukan efisiensi. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa tingkat efisiensi organisasi berkorelasi positif dengan jumlah output dibandingkan input. Ukuran seberapa efektif suatu organisasi menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan hasil yang diinginkannya disebut efisiensi. Sebaliknya, biaya atas output juga disebut sebagai ukuran efisiensi (Mahmud, 2005). Produk terkait erat dengan efisiensi. Efisiensi diukur dengan membandingkan input dan output. Tidak ada metrik khusus untuk mengukur produktivitas atau efisiensi adalah ukuran efektivitas; penilaian efisiensi lebih bersifat individual. Ketika suatu proses kerja dapat menghasilkan keluaran tertentu dengan menggunakan sumber daya sesedikit mungkin, maka dikatakan efisien. Ungkapan "menghasilkan dengan baik" juga sering digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi dari proses tersebut.
3. Efektivitas: Pengukuran efektivitas sebuah organisasi adalah seberapa baik organisasi tersebut mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dianggap efektif. Satu-satunya metode untuk menentukan apakah suatu program atau kegiatan telah berhasil mencapai tujuannya.

# Penelitian Terdahulu

Penelitian dimulai dengan penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk menentukan apakah penelitian tersebut menegaskan, menyangkal, atau mengambil posisi lain yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Sejumlah penelitian terkenal berbagi teknik dan aspek lainnya dengan sejumlah peneliti sebelumnya adalah:

Umar dan Syawalna (2018) meneliti bagaimana Efektivitas lembaga inspektorat di Aceh dipengaruhi oleh akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan temuan penelitian, akuntabilitas dan transparansi mempunyai dampak terhadap kinerja Inspektorat Aceh secara keseluruhan. Akuntabilitas mempunyai pengaruh secara parsial dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155 terhadap kinerja kantor, dan transparansi mempunyai pengaruh secara parsial dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155 terhadap kinerja kantor sebagai auditor. Temuan penelitian menunjukkan hal itu kinerja

Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Magelang, Yoga Andryan (2021). Temuan penelitian menunjukkan efektivitas penerapan pengelolaan keuangan daerah di BPPKAD Kabupaten Magelang. Berdasarkan penelitian, terdapat sebelas indikator akuntabilitas, nilai uang, kejujuran, transparansi, pengendalian, komprehensif, disiplin, mudah beradaptasi, dapat diprediksi, dan informatif yang menunjukkan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh akuntabilitas dan keterbukaan terhadap kinerja institusi pemerintah diteliti oleh Novatan dkk. (2019). Temuan studi ini menunjukkan tingginya tingkat akuntabilitas dan keterbukaan AKPD Kabupaten Bandung Barat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas dan keterbukaan mempunyai pengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja instansi pemerintah.

“Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Kajian Empiris Pemerintahan Daerah Kabupaten di Provinsi Lampung” ditulis dan diterbitkan pada tahun 2019 oleh Nurhadanto dan Khamsah. Temuan menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Lampung kurang transparan atau masuk dalam kategori ringan (Kurang atau Tidak Ada). Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan belum diprioritaskan oleh pemerintah daerah Lampung. Daerah transparan juga mempunyai jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang banyak dan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan justifikasi kepada pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam meningkatkan keterbukaan pengelolaan anggaran daerah.

Dampak akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap jalannya pemerintahan daerah Kabupaten Deya diteliti oleh Edowa (2021). Temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deya. Dengan kata lain, kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deya akan semakin baik jika semakin akuntabel. Kemudian disajikan temuan persamaan regresi mengenai keterbukaan dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deya.

Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 dilakukan oleh Karina dan Wibowo pada tahun 2022. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi kemerosotan selama pandemi, Pemerintah Daerah Kota Semarang Secara keseluruhan, kinerja City cukup baik secara finansial. Hal ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan DOF yang positif, rasio independensi dalam pola hubungan konsultatif, efikasi PAD yang cukup baik, efisiensi sistem keuangan daerah, dan rasio keselarasan yang sangat baik.

Dampak Pengelolaan, Akuntabilitas, dan Transparansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sinja merupakan penelitian yang dilakukan oleh Nurhaeda dan Tenrola pada tahun 2022. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, pengelolaan keuangan daerah tidak mempunyai dampak nyata terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. sebaliknya, akuntabilitas dan transparansi mempunyai dampak positif dan besar terhadap kinerja keuangan.

Di Kabupaten Musi Rawas, Kartoprawiro dan Susanto (2018) mengevaluasi efektivitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, motivasi, dan dukungan sumber daya aparatur dari sistem akuntansi keuangan daerah semuanya berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, serta tingkat pemahaman aparatur terhadap seluk-beluknya. pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai dampak. Hal ini direkomendasikan oleh penelitian untuk meningkatkan pelaporan akuntabilitas manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh Amal dan Suwandhi (2021) menyelidiki dampak keterbukaan, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah. Temuan penelitian mengenai pengaruh variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap efektivitas pemerintahan daerah Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian mengenai hubungan karakteristik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah juga mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan kinerja pemerintah.

Badriyah & Binawat (2022), Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang secara substansial dipengaruhi oleh faktor pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah. Hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang sedikit dipengaruhi oleh hasil pengawasan keuangan daerah. Derajat akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Hasil uji parsial uji T menunjukkan hal ini.

***Tabel 2***

***Penelitian Terdahulu***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Penelitian dan Judul** | **Hasil Penelitian** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 1 | (Umar & Syawalna, 2018)  Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja instansi inspektorat Aceh | Akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kinerja Kantor inspektorat Aceh secara simultan. Secara parsial, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Kantor inspektorat Aceh dengan koefisien regresi sebesar 0,155, sementara transparansi juga berpengaruh positif terhadap kinerja auditor di Kantor inspektorat Aceh dengan koefisien regresi sebesar 0,137. | Menggunakan Variabel Akuntabilitas dan transparansi, dan pengelolaan keuangan daerah  Menggunakan jenis penelitian kuantitatif | Menggunakan 3 variabel yaitu pengelolaan keuangan daerah, kinerja laporan keuangan daerah, dan transparansi dan akuntabilitas  Lokasi peneliti di Badan Keuangan Daerah |
| 2 | (Yoga Andryan, 2021)  Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. | Pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magelang secara menyeluruh telah dijalankan dengan baik. Proses pengelolaan keuangan di BPPKAD Kabupaten Magelang meliputi sepuluh indikator, termasuk akuntabilitas, value for money, probity (kejujuran dalam mengelola keuangan), transparansi, pengendalian, komprehensif, disiplin, fleksibilitas, prediktabilitas, dan informasi yang lengkap. | Menggunakan variabel Pengelolaan keuangan daerah  Menggunakan jenis penelitian Kuantitatif | Menggunakan 3 variabel yaitu pengelolaan keuangan daerah, kinerja laporan keuangan daerah, dan transparansi dan akuntabilitas  Lokasi peneliti di Badan Keuangan Daerah |
| 3 | (Novatan et al., 2019)  Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. | Tingkat transparansi dan akuntabilitas di SKPD Kabupaten Bandung Barat telah baik. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan variabel transparansi dan akuntabilitas | Menggunakan Variabel Transparansi dan akuntabilitas | menggunakan tiga variabel, yaitu pengelolaan keuangan daerah, kinerja laporan keuangan daerah, serta transparansi dan akuntabilitas.  Lokasi penelitian di Badan Keuangan Daerah. |
| 4 | (Nurhadanto & Khamsah, 2019)  Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung | Rata-rata tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih tergolong rendah (scant or none) atau kurang memadai. Ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Selain itu, daerah yang mencapai tingkat transparansi yang tinggi cenderung memiliki opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang signifikan. | Menggunakan variabel pengelolaan keuangan daerah dan transparansi | Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu pengelolaan keuangan daerah, kinerja laporan keuangan daerah, serta transparansi dan akuntabilitas.  Lokasi penelitian di Badan Keuangan Daerah. |
| 5 | (Edowa, 2021)  Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiya. | Akuntabilitas berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deya. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Selain itu, hasil regresi menunjukkan hubungan antara tingkat transparansi dengan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deya. | Menggunakan variabel transparansi dan akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan daerah  Menggunakan jenis penelitian kuantitatif | Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu pengelolaan keuangan daerah, kinerja laporan keuangan daerah, serta transparansi dan akuntabilitas.  Lokasi penelitian di Badan Keuangan Daerah. |
| 6 | (Karina & Wibowo, 2022)  Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 | Secara keseluruhan, meskipun mengalami penurunan selama masa pandemi, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif, hubungan konsultatif yang memperlihatkan rasio kemandirian yang baik, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup efektif, efisiensi keuangan daerah yang tinggi, dan keserasian yang baik dalam pengelolaan keuangan. | Menggunakan variabel kinerja keuangan | Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu pengelolaan keuangan daerah, kinerja laporan keuangan daerah, serta transparansi dan akuntabilitas.  Lokasi penelitian di Badan Keuangan Daerah. |
| 7 | (Nurhaeda & Tenriola, 2022)  Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. | Pengelolaan keuangan daerah tidak memiliki dampak yang berarti terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara tingkat akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai.. | Menggunakan variabel pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi | Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu pengelolaan keuangan daerah, kinerja laporan keuangan daerah, serta transparansi dan akuntabilitas.  Lokasi penelitian di Badan Keuangan Daerah. |
| 8 | (Kartoprawiro & Susanto, 2018)  Analisis terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas | Kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dipengaruhi secara bersamaan oleh kompetensi sumber daya manusia, motivasi aparatur, dan keberadaan sistem akuntansi keuangan daerah. Secara terpisah, kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh tingkat kompetensi aparatur dalam menguasai teknis pengelolaan keuangan daerah. Disarankan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. | Menggunakan variabel kinerja laporan keuangan daerah | Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu pengelolaan keuangan daerah, kinerja laporan keuangan daerah, serta transparansi dan akuntabilitas.  Lokasi penelitian di Badan Keuangan Daerah. |
| 9 | (Amal & Suwandi, 2021)  Pengaruh Pengawasan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah | Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen. | Menggunakan variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan daerah | Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu pengelolaan keuangan daerah, kinerja laporan keuangan daerah, serta transparansi dan akuntabilitas.  Lokasi penelitian di Badan Keuangan Daerah. |
| 10 | (Binawat & Badriyah, 2022)  Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Magelang. | Hasil uji F menunjukkan pengaruh signifikan variabel-variabel pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dan hasil uji T menunjukkan ada variabel yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Penelitian ini menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi. | Menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi  Menggunakan jenis penelitian kuantitatif | Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu pengelolaan keuangan daerah, kinerja laporan keuangan daerah, serta transparansi dan akuntabilitas.  Lokasi penelitian di Badan Keuangan Daerah. |

# Kerangka Pemikiran Konseptual

Untuk menggabungkan atau menjelaskan topik yang akan dibahas, kerangka konsep menunjukkan hubungan atau keterkaitan antara konsep-konsep tertentu dalam masalah yang akan dibahas. Penelitian ini bertujuan buat memilih apakah pengelolaan serta kinerja laporan keuangan daerah Badan Keuangan wilayah pemkot Tegal bisa mewujudkan transparansi serta akuntabilitas..

1. **Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal**

Dalam sektor publik, banyak diskusi tentang pengelolaan keuangan wilayah. Bila pemda dikelola menggunakan baik, mereka lebih transparan dan akuntabel, sedangkan jika mereka tidak. Menurut Abdullah (2017), " Pengelolaan keuangan daerah yang baik bisa menaikkan transparansi serta akuntabilitas pada mewujudkan tujuan organisasi." Pendapat ini sejalan menggunakan Bratakusumah D. S. (2001), yang menyatakan, "Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak serta kewajiban daerah pada rangka penyelenggaraan pemerintahan wilayah yang bisa dilakukan menggunakan uang, pada kerangka APBD yang dikelola secara efektif dan efisien buat memenuhi tujuan organisasi." Singkatnya, transparansi dan akuntabilitas terkait langsung menggunakan pengelolaan keuangan daerah yang baik..

Sebagai bagian dari tata kelola yang baik, pemerintah masih berupaya meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sistem administrasi negara (Engkus et al., 2021). Penerbitan dan Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah diambil oleh pemerintah. Edowat et al. (2021) menemukan bahwa variabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kalimantan Barat berdampak menguntungkan dan patut diperhatikan dalam hal akuntabilitas dan keterbukaan. Namun, penelitian Ngahil & Kaukab (2020) menemukan bahwa variabel pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo berdampak negatif dan tidak signifikan ke arah akuntabilitas dan keterbukaan.

1. **Kinerja Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan sarana yang digunakan pemerintah daerah untuk memberikan jawaban kepada masyarakat mengenai kinerja keuangannya. Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengkaji dan mengevaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Dalam hal laporan keuangan badan pemerintah daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, maka laporan keuangan badan pemerintah daerah tersebut dianggap wajar dan berkualitas. Pemerintah telah menetapkan standar untuk Salah satu kebutuhan akan laporan keuangan berkualitas tinggi adalah penyajiannya yang konsisten. Di sini yang dimaksud dengan dapat dipercaya adalah menyajikan secara akurat dan dapat diandalkan, bebas dari pernyataan palsu dan kesalahan yang signifikan (Mahmud, 2005).

Tujuan pengukuran kinerja pemerintah, menurut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2002), adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah sehingga pemerintah dapat berkonsentrasi pada tugas dan tujuan yang dituangkan dalam program kerja. Pada akhirnya, evaluasi kinerja harus membantu pemerintah dalam berkonsentrasi pada cara mendistribusikan dana, membuat pilihan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Studi Kusumadewi (2021) menemukan bahwa kinerja laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera mempunyai dampak yang penting dan menguntungkan terhadap akuntabilitas dan keterbukaan. Sebaliknya, penelitian Farda & Nugraha tahun 2019 menemukan hal itu kinerja Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang mempunyai pengaruh yang mer ugikan dan tidak berarti transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan masalah Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5

H1

Trasnparansi (Y1)

Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)

H1

H2 H3

Kinerja Laporan Keuangan Daerah (X2)

Akuntabilitas (Y2)

H4

H6

Keteraingain : Pengairuh Parsiail

Pengairuh Simultain

**Gaimbair 1**

**Keraingkai Konseptuail**

# Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, hipotesis penelitian didasarkan pada data empiris, setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 = Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal.

H2 = Kinerja laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi

Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

H3 = Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal.

H4 = Kinerja laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas

Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

H5 = Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah

berpengaruh secara simultan terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal.

H6 = Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah

berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

# Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif ini berupaya mengidentifikasi, memvalidasi, dan memajukan informasi yang dapat diterapkan untuk memahami, mengatasi, dan meramalkan masalah yang akan datang dengan mengumpulkan data yang objektif, valid, dan kredibel. Penelitian asosiatif menyelidiki hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019:14). Terdapat keterkaitan antara pengelolaan keuangan daerah dengan efektivitas pelaporan keuangan Badan Keuangan Daerah untuk mendorong akuntabilitas dan keterbukaan Pemerintah Kota Tegal.

# Populasi dan Sampel

* 1. Populasi

(Sugiyono, 2012:80) Populasi terdiri dari hal-hal atau orang-orang dengan kualitas tertentu yang dipilih peneliti untuk diselidiki dan diambil kesimpulannya. Dari definisi di atas jelas bahwa populasi adalah kumpulan orang dengan karakteristik tersebut. Dengan pengecualian Kepala Badan Keuangan Daerah, total 80 karyawan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal termasuk dalam populasi penelitian ini.

* 1. Sampel

Peneliti mengumpulkan data tentang objek tertentu untuk membuktikan kebenaran jawaban. Peneliti menggunakan sampel dari populasi karena objek dalam populasi terlalu luas. (Sugiyono, 2012), Kuantitas dan atribut sampel adalah milik populasi. Dengan menggunakan teknik sampling, sampel dipilih dari populasi tersebut (Sugiyono, 2012:85). Semua orang dalam populasi tersebut menggunakan teknik sampling jenuh. Hal ini biasanya disebabkan oleh populasi Penelitian yang berupaya menarik kesimpulan luas cenderung memilih ukuran sampel yang relatif sederhana yaitu kurang dari tiga puluh partisipan. Setiap orang dalam populasi menggunakan sampel untuk pengambilan sampel. jenuh.

Sampling jenuh sebagaimana dimaksud di atas adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan setiap anggota populasi sebagai sampel. Populasi yang dijadikan sampel adalah seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal yang berjumlah 80 orang. Personil Badan Keuangan Daerah tercantum di bawah ini:

***Tabel 3***

***Daftar Pegawai Badan keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Bagian-bagian | Jumlah Pegawai |
| 1 | Sekretaris | 1 |
| 2 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 1 |
| 3 | Analis Organisasi dan Tatalaksana | 1 |
| 4 | Pengadministrasi Umum | 4 |
| 5 | Pengadministrasi Pajak | 6 |
| 6 | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 1 |
| 7 | Kasubag Keuangan | 1 |
| 8 | Verifikator Keuangan | 1 |
| 9 | Kasubag Perencanaan dan Evaluasi | 1 |
| 10 | Kepala Bidang Anggaran | 1 |
| 11 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda | 13 |
| 12 | Ahli Pertama – Pranata Komputer | 1 |
| 13 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 2 |
| 14 | Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah | 1 |
| 15 | Penilaian Pemerintah Muda | 1 |
| 16 | Penyusun Kebutuhan Rencana Sarana dan Prasarana | 1 |
| 17 | Pengemudi Mobil dinas Badan Keuangan Daerah Kota Tegal | 1 |
| 18 | Analisis Aset Daerah | 1 |
| 19 | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 1 |
| 20 | Pengelola Laporan Keuangan Daerah | 1 |
| 21 | Kepala Bidang Perbendaharaan | 1 |
| 22 | Terampil – Pranata Komputer | 2 |
| 23 | Analis Perbendaharaan | 1 |
| 24 | Analis Pengelolaan Sistem informasi Perbendaharaan | 1 |
| 25 | Pranata Komputer Ahli Pertama Bendahara Gaji | 1 |
| 26 | Pemeriksa Transaksi Keuangan | 1 |
| 27 | Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 |
| 28 | Pengadministrasi Penerimaan | 1 |
| 29 | Analis Pendapatan Daerah | 1 |
| 30 | Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 |
| 31 | Analis Pajak dan Retribusi Daerah | 3 |
| 32 | Pranata Komputer Terampil | 1 |
| 33 | BMD (Barang Mlk Daerah) | 3 |
| 34 | Akuntansi dan Pelaporan | 1 |
| 35 | Anggaran | 1 |
| 36 | Perbendaharaan | 3 |
| 37 | Sekretariat | 1 |
| 38 | P3DRD (Petugas Pengelola dan Penatausahaan Data Retribusi Daerah) | 15 |
| Jumlah | | 80 |

Sumber: Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

# Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual

* + 1. Variabel Dependen
       1. Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi adalah sebuah aturan yang menjamin bahwa informasi mengenai kebijakan, pembuatannya, penerapannya, dan hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut tersedia secara bebas dan dapat diakses oleh semua orang. Prinsip ini terdiri dari dua komponen: kontak pemerintah dengan masyarakat dan hak masyarakat atas informasi. Seharusnya pemerintah tidak mengawasi kinerjanya dengan baik, keduanya akan sangat sulit (Putra, 2014).

* + - 1. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Semua tahapan Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah semuanya harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan publik untuk evaluasi tahun berikutnya (Abdullah, 2017:87).

* + 1. Variabel independen
       1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Ada akuntabilitas dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja, dengan jumlah dana yang dialokasikan dan tujuan strategis yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat dikatakan meningkatkan kinerja usaha atau lembaga (Suryana, 2017).

* + - 1. Kinerja Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan seberapa baik tindakan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah federal meningkat seiring dengan meningkatnya rasio tersebut. (Budianto, 2016).

2. Operasional Variabel

Variabel adalah karakteristik, sifat, atau nilai seseorang dari objek atau kegiatan yang mengalami variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan tentangnya. "Operasionalisasi variabel" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel independen dan dependen diperlukan untuk penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019:69), variabel independen (bebas) menciptakan atau mengubah variabel dependen (terikat). Sebaliknya, variabel dependen (terikat) adalah yang dipengaruhi oleh timbulnya variabel independen (bebas). Tiga variabel digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen (X) adalah kinerja laporan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan, dan variabel dependen (Y) adalah transparansi dan akuntabilitas. Tabel berikut menunjukkan definisi operasional variabel ini:

***Tabel 4***

***Operasionalisasi Variabel***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **No tem Pertanyaan** | **Sumber** |
| 1 | Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) | Perencanaan | 1. Mendefinisikan dengan jelas hasil dan manfaat yang diinginkan, serta metrik kinerja yang harus dipenuhi 2. Menetapkan biaya satuan yang wajar, perhitungan beban kerja, dan prioritas kegiatan | 1, 2 dan 3 | (Dadang Suwanda dan Hendri Santosa, 2014) dan (Dwi Ratmono, 2017) |
| Pelaksanaan | 1. Sistem pendapatan dan sistem pembayaran merupakan dua sistem yang berperan dalam pelaksanaan anggaran pada saat satuan kerja menjalankan tugasnya | 4, 5 dan 6 |
| Penatausahaan | 1. Merupakan proses tindakan seperti penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan, pendokumentasian, dan pelaporan | 7, 8 dan 9 |
| Pelaporan | 1. Menyediakan data yang dapat digunakan untuk memandu pilihan dan untuk menunjukkan bahwa entitas dan sumber daya pelapor dapat dipertanggungjawabkan. | 10, 11 dan 12 |
| Pertanggung  jawaban | 1. Respons akuntabilitas berbasis kinerja dan akuntabilitas keuangan | 13, 14 dan 15 |
| Pengawasan | 1. Peraturan perundang-undangan, termasuk Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan. | 16, 17 dan 18 |
| 2 | Kinerja Laporan Keuangan Daerah (X2) | Relevan | 1. Mempunyai keunggulan berupa kritik yang membangun terhadap tugas yang akan diselesaikan selanjutnya 2. Memiliki kemampuan memberikan laporan keuangan yang dapat diprediksi untuk membantu tugas-tugas lembaga yang akan datang 3. Pelaporan keuangan harus akurat dan dapat dipercaya. 4. Kebijakan-kebijakan yang perlu diikuti menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. 5. Laporan keuangan harus tepat dan komprehensif. | 1, 2 dan 3 | Mursyid, 2018) |
| Andal | 1. Dalam menyajikan fakta laporan keuangan, unsur yang paling krusial adalah penyajian yang jujur. 2. Informasi yang masuk akal dan dapat diverifikasi diperlukan untuk kelancaran operasi kerja. 3. Netral karena diperlukan untuk memastikan keakuratan laporan keuangan 4. Pencatatan berkala dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Data laporan keuangan digunakan sesuai peruntukannya dan tidak memberikan manfaat bagi siapapun. | 4, 5 dan 6 |
| Dapat Dipahami | 1. Perbandingan internal dan eksternal dimungkinkan. Membandingkan data dari beberapa laporan keuangan untuk memastikan operasi berfungsi dengan lancar dan memandu tindakan di masa depan | 7, 8 dan 9 |
| Dapat Dibandingkan | 1. Mengenali keterbatasan pengguna. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat beradaptasi dan mudah digunakan. 2. Laporan keuangan harus digunakan dan dieksploitasi sesuai dengan tujuan pembuatannya. | 10, 11 dan 12 |
| 3 | Transparansi Badan Keuangan Daerah (Y1) | informasi *(informatif)* | 1. Tidak diragukan lagi tepat dan cepat 2. Mudah didapat 3. Cukup | 1 dan 2 | (Mardiasmo, 2002) |
| Keterbukaan *(Openness)* | 1. Semua data harus transparan. 2. Semua informasi publik harus mudah ditemukan | 3 dan 4 |
| Pengungkapan *(disclosure)* | 1. Keadaan keuangan 2. Gaya perencanaan dan hasil kegiatan 3. Komposisi pengurus | 5 dan 6 |
| 4 | Akuntabilitas Badan Keuangan Daerah (Y2) | Akuntabilitas kejujuran dan hukum *(accountability for probity and legality)* | 1. Menjauhi kerja sama, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang 2. Mematuhi persyaratan hukum yang relevan | 1 dan 2 | (Mahmud, 2005) |
| Akuntabilitas manajerial | 1. Manajemen organisasi yang efisien dan sukses | 3 dan 4 |
| Akuntabilitas program *(program accountability*) | 1. Tercapainya maksud, visi, dan tujuan organisasi 2. Pendekatan | 5 dan 6 |
| Akuntabilitas kebijakan *(policy accountability)* | 1. Tanggung jawab tanggapan terhadap kebijakan yang diterapkan | 7 |
| Akuntabilitas financial | 1. Ekonomis, produktif, dan ekonomis 2. Menghasilkan laporan keuangan yang merinci keberhasilan keuangan perusahaan. | 8 dan 9 |

# 

# Teknik Pengumpulan Data

Data atau informasi diperlukan untuk melengkapi peneliti ini. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden dengan cara berikut untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Penelitian observasional menggunakan pengamatan langsung di Kantor Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal untuk mengumpulkan informasi.

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah melalui wawancara. Wawancara langsung dapat dilakukan, begitu pula pilihan untuk melakukan wawancara secara tidak langsung, misalnya dengan sesekali memberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang diwawancarai berikutnya. Pedoman wawancara dan "checklist" bisa menjadi alat.

1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang memberikan data atau daftar pertanyaan kepada peserta untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan. Kuesioner diberikan kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, skor, atau penilaian, yang diberikan pada bagian angket atau kuesioner, memiliki beberapa pilihan jawaban berdasarkan skala responden: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Tabel berikut menunjukkan pilihan jawaban alternatif.

***Tabel 5***

***Alternatif Pilihan Jawaban***

|  |  |
| --- | --- |
| Alternatif Jawaban | Skala Likert |
| Sangat Setuju (SS) | 5 |
| Setuju (S) | 4 |
| Netral (N) | 3 |
| Tidak Setuju (ST) | 2 |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 |

Sumber : Ghozali (2013)

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dokumen, arsip, literatur, dan karya ilmiah yang relevan dengan subjek penelitian.

# Uji Validitas dan Reliabilitas instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah suatu kuesioner sah. Jika pertanyaannya mampu mengungkap tujuan kuesioner, kuesioner dikatakan valid. (Sunjoyo, 2013:41), suatu indikator dianggap valid jika koefisien korelasinya lebih dari 0,30.

1. Reliabilitas instrumen Penelitian

Validitas suatu kuesioner sebagai prediktor suatu konsep atau variabel penelitian dinilai melalui uji reliabilitas. Jika seorang responden secara konsisten atau terus-menerus menjawab pertanyaan yang sama dalam kuesioner, maka hal tersebut dianggap dapat diandalkan. Suatu konstruk atau variabel dianggap dapat diandalkan jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,60. (Ghozali, 2011:41).

# Teknik Analisis Data

1. Uji Kualitas Data Penelitian

Kualitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian dinilai melalui uji kualitas data; dengan kata lain, kuesioner tersebut dapat dianggap representatif atau mencerminkan keadaan penelitian. Berikut ini adalah daftar instrumen yang diuji dalam penelitian ini:

1. Uji Validitas

(Sugiyono, 2019), validitas Tujuan dari data ini adalah untuk mengetahui apakah pertanyaan kuesioner yang dikembangkan mampu mengukur variabel-variabel yang diteliti. Setiap item diuji validitasnya dengan menggunakan sistem analisis. Hal ini dicapai dengan membandingkan skor tiap item dengan skor total, yang merupakan produk dari seluruh skor item. Berdasarkan standar yang digunakan untuk memvalidasinya, suatu alat dianggap valid atau sesuai untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Kriteria berikut diterapkan untuk mengaktifkan validitas:

1. Kriteria benar apabila r hitung positif dan r hitung > r tabel.
2. Kriteria valid apabila r hitung positif dan r hitung > r tabel.
3. Uji *Reliabilitas*

(Sugiyono, 2019), alat yang reliabel adalah alat yang menghasilkan data yang sama bahkan setelah pengukuran objek yang sama berulang kali. Salah satu teknik penilaian kuesioner yang berfungsi sebagai ukuran konstruk atau variabel adalah uji reliabilitas. Jika seseorang secara konsisten menanggapi suatu pernyataan, butir pertanyaan dianggap reliabel atau andal. Untuk mengetahui seberapa andal setiap butir pernyataan, kuesioner dibagikan kepada para peserta, dan kemudian skor mereka dihitung untuk mengetahui apakah ada korelasi antara Skor tanggapan untuk bagian teks yang sama. Program komputer Program Statistik untuk Ilmu Sosial (SPSS) digunakan untuk ini. Jika nilai Cronbach Alpha (α) suatu instrumen lebih dari 0,60 maka dianggap dapat diandalkan. Ketika pembacaannya turun di bawah 0,60, perangkat dikatakan demikian reliabel.

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah syarat analisis agar data dapat bermakna dan bermanfaat untuk melakukan analisis regresi berganda. Hanya uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas yang digunakan untuk uji asumsi klasik dalam penelitian ini. Karena penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner, yang tidak berhubungan dengan model data yang memakai rentang waktu, uji autokorelasi tidak digunakan.

1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dibuat berdistribusi normal. Distribusi data harus normal atau mendekati normal untuk model regresi yang baik. Plot probabilitas normal dan diagram histogram yang condong ke kanan dan ke kiri menunjukkan pengujian normalitas penelitian ini. Untuk uji normalitas, dua prinsip pengambilan keputusan digunakan (Ghozali, 2011):

1. Model regresi memenuhi asumsi normalitas jika data berdistribusi di sekitar garis diagonal dan mengikuti arahnya, atau jika grafik histogram berdistribusi normal.
2. Model regresi tidak memenuhi syarat normalitas jika data tersebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arahnya.
3. Uji *Multikolinieritas*

Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi yang kuat antara variabel independen. Jika ada korelasi, masalah multikolinieritas harus diselesaikan. Faktor penginflasian perbedaan (VIF) dan nilai tolerabilitas dapat digunakan untuk menguji multikolinieritas. Gejala multikolinieritas terjadi jika VIF lebih dari 10 dan nilai tolerabilitas kurang dari 0,10 (Ghozali, 2015).

1. Uji *Heteroskedastisitas*

Apabila terdapat variansi yang tidak seragam pada residu antar pengamatan, maka model regresi menggunakan uji heteroskedastisitas untuk mengetahuinya. Heteroskedastisitas menurut Kuncoro (2011) merupakan akibat kesalahan model atau residu yang tidak bervariasi secara konsisten dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa karena perubahan keadaan yang tidak diperhitungkan oleh model yang digunakan, setiap observasi menunjukkan tingkat ketergantungan yang berbeda. Jika varians sisa antar pengamatan konstan, maka terjadi homoskedastisitas. Dengan menggunakan kriteria yang dijelaskan Sugiyono, heteroskedastisitas ditemukan dalam penelitian ini dengan memeriksa scatterplot (2019):

1. Jika data menunjukkan pola yang teratur seperti gelombang, melebar, atau menyempit;
2. Jika tidak ada pola yang jelas atau tidak terlihat, maka heteroskedastisitas ditemukan..
3. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda untuk analisis data dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis mencakup unsur interaksi antara variabel independen, seperti perkalian dua atau lebih variabel independen dalam persamaan regresinya. Dengan pendekatan ini, diperoleh persamaan regresi secara sistematis.

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, digunakan Untuk menilai pengaruh gabungan dan individual dari faktor-faktor independen terhadap variabel dependen, gunakan analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda yang digunakan, sebagaimana dirinci, diacu dalam penjelasan ini persamaan berikut:

***Y1 = α + β1 X1 + β2 X1 + e***

***Y2 = α + β1 X1 + β2 X1 + e***

Keterangan :

Y1 = Akuntabilitas Badan Keuangan Daerah

Y2 = Transparansi Badan Keuangan Daerah

α = Konstanta

β1, β2, = Koefisien Regresi

X1 = Pengelolaan Keuangan Daerah

X2 = Kinerja Laporan Keuangan Daerah

E = Standar Error

1. Uji Hipotesis
2. Uji Parsial (Uji t)

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diukur dengan uji t. Hasilnya dianggap signifikan jika nilai t hitung melebihi nilai t tabel pada tingkat signifikansi kurang dari 0,05, sehingga dapat mengindikasikan kedua hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol (Ho). (Ghozali, 2011). Dasar Pengambilan Keputusan:

*Ho* : β1 = 0 : Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

*Hα* : β1 ≠ 0 : Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

*Ho* : β2 = 0 : Kinerja laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

*Hα :* β2  ≠ 0 : Kinerja laporan keuangan daerah berpengaruhterhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

*Ho* : β3 = 0 : Pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

*Hα* : β3 ≠ 0 : Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

*Ho* : β4 = 0 : Kinerja laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

*Hα :* β4  ≠ 0 : Kinerja laporan keuangan daerah berpengaruhterhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

Rumus t hitung adalah sebagai berikut:

**thitung**

Keterangan:

thitung  = Nilai uji t yang dihitung

b = Koefisien regresi X

Se= Standar error koefisien regresi X

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah faktor-faktor independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam mengambil keputusan adalah hipotesis alternatif (Ha) dapat diterima jika nilai F taksiran lebih besar dari nilai F tabel dan ambang signifikansinya kurang dari 0,05 nol (Ho) ditolak (Ghozali, 2011):

*Ho :* β1β2 = 0 : Pengelolaan keuangan daerah dan kinerjalaporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

*Hα :* β1β2 ≠ 0 : Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

*Ho :* β3β4 = 0 : Pengelolaan keuangan daerah dan kinerjalaporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

*Hα :* β3β4 ≠ 0 : Pengelolaan keuangan daerah dan kinerja laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tegal

F hitung dapat diketahui dengan rumus:

**Fhitung = Jkreg – K**

**(Jkres/(n – k – 1)**

Keterangan:

JKreg = Jumlah Kuadrat Regresi

JKreg = Jumlah Kuadrat Bebas

K = Jumlah variabel Bebas

n = Ukuran Sampel

1. Koefisien Determinasi

Sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variasi variabel terikat ditunjukkan dengan koefisien determinasi yang berkisar antara 0 sampai 1 (0 < R² ≤ 1). Tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen bila nilai R2 0. Adjusted R2 menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh kuat terhadap variabel dependen jika mendekati 1. Sebaliknya, angka yang hampir sama dengan nol menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang kecil terhadap variabel dependen. Berikut rumus koefisien determinasi:

**Kd = r2 x 100%**

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi

R2 = Koefisien Korelasi